

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TRANSPARANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN
VALUE FOR MONEY SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Palembang)**

SKRIPSI



Nama : Kms M Syarifudin
NIM : 222016067

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TRANSPARANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN
VALUE FOR MONEY SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Palembang)**

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Kms M Syarifudin
NIM : 222016067**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Kms M Syarifudin
NIM : 222016067
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan *Value For Money* Sebagai Variabel Moderasi.

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 (satu) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang Maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2020



Kms M Syarifudin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan *Value For Money* Sebagai Variabel Moderasi
Nama : Kms M Syarifudin
NIM : 222016067
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

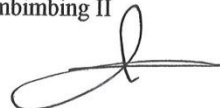
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Februari 2020

Pembimbing I



DR. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak.CA
NIDN/NBM : 0002095507/972321

Pembimbing II



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Mengetahui,
Dekan

u. E. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah, 6-8)

Ku persembahkan skripsi ini kepada

- 1. Mama dan Papa tercinta*
- 2. Almarhumah bibiku tercinta*
- 3. Adik-adikku tersayang*
- 4. Keluarga Besar tersayang*
- 5. Dosen Pembimbingku*
- 6. Almamaterku tercinta*

ABSTRAK

Kms M Syarifudin/222016067/2020/ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan *Value For Money* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan *value for money* sebagai variabel moderasi (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan dilingkup Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang sebanyak 84 responden . Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa, (1) kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan transparansi secara bersama positif dan signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan transparansi secara parsial positif dan signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (3) *value for money* memoderasi kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan transparansi secara *quasi moderated* memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

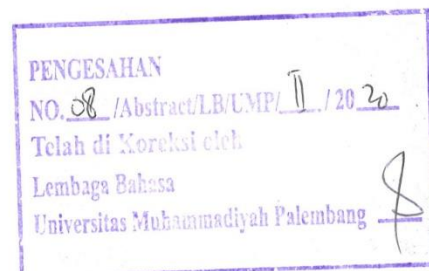
Kata Kunci : kompetensi , pengendalian, transparansi, *value for money*, akuntabilitas

Abstract

Kms M Syarifudin/222016067/2020/ The Influence of Human Resource Competence, Internal Control Systems and Transparency on Accountability of Regional Financial Management with Value For Money as Moderation Variables (Case Study on Regional Apparatus Organizations of Palembang City Government)

The problem of this study was how the influence of human resource competence, internal control systems and transparency on accountability of regional financial management with value for money as moderation variables (case study on regional apparatus organizations of Palembang city government). The type of research used was an associative study. The data used were primary and secondary data. The population in this study was the financial scope of the Regional Apparatus Organizations of Palembang city government as many as 84 respondents. Data collection techniques using interviews, observation and questionnaires. Data analysis methods used in this study were quantitative and qualitative analysis. The results showed that, (1) human resource competencies, internal control systems and transparency simultaneously gave positively and significantly affect the accountability of regional financial management. (2) human resource competencies, internal control systems and transparency partially gave positive and significantly affect the accountability of regional financial management. (3) value for money moderates the competency of human resources, internal control systems and transparency in a quasi-moderated way affecting the accountability of regional financial management.

Keywords : *competencies, control , transparency, value for money, accountability*



PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah robbil'alamin, Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan *Value For Money* Sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata I (satu) guna meraih gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan dan saran. Adapun hasil dari penelitian ini Secara bersama-sama (Uji f) variabel kompetensi SDM, sistem pengendalian internal dan transparansi secara bersama-sama positif memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah . Secara parsial (Uji t) variabel kompetensi SDM, sistem pengendalian internal dan transparansi positif dan signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara moderasi (Uji MRA) *value for money* signifikan memengaruhi kompetensi SDM, sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai *quasi moderasi*.

Walaupun dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran bantuan dan

dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta, Mamaku Megawati dan Papaku Kms Sopyan juga Alm.bibinda Nyimas Badariah serta keluarga yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam menjalankan kuliah agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing 1 Ibu Dr. Sa'adah Siddik.,SE., Ak., M.Si., CA dan Dosen Pembimbing 2 Bapak Betri Sirajuddin S.E., Ak., M.Si. CA yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan penulis dalam menempuh pendidikan di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, berserta staff wakil rektor.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, berserta staff wakil dekan.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak., M.Si. CA selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak dan Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca.

Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori.....	17
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	17
2. Teori Kontijensi	21
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	22
a. Pengertian Akuntabilitas	22
b. Indikator Akuntabilitas.....	23
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas.....	25
4. Kompetensi SDM.....	26
a. Pengertian Kompetensi SDM.....	26
b. Indikator Kompetensi SDM	27

c.	Manfaat Kompetensi SDM	27
5.	Sistem Pengendalian Internal	29
a.	Pengertian Sistem Pengendalian Internal	29
b.	Indikator Sistem Pengendalian Internal	30
c.	Tujuan Sistem Pengendalian Internal	35
6.	Transparansi	36
a.	Pengertian Transparansi	36
b.	Indikator Transparansi	37
c.	Manfaat Transparansi	38
7.	<i>Value For Money</i>	38
a.	Pengertian <i>Value For Money</i>	38
b.	Indikator <i>Value For Money</i>	40
c.	Manfaat <i>Value For Money</i>	41
8.	Keterkaitan Antara Variabel	42
a.	Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	42
b.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	43
c.	Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	44
d.	Pengaruh <i>Value For Money</i> Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	45
e.	<i>Value For Money</i> Memoderasi Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	46
f.	<i>Value For Money</i> Memoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	47
g.	<i>Value For Money</i> Memoderasi Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	48
B.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	49
C.	Kerangka Pemikiran	54
D.	Hipotesis	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Operasionalisasi Variabel.....	59
D. Populasi dan Sampel	60
E. Data Yang Diperlukan.....	62
F. Metode Pengumpulan Data	63
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	64
1. Analisis Data	64
2. Teknik Analisis	67
a. Statistik Deskriptif	68
b. Uji Validitas	68
c. Uji Reliabilitas	69
d. Uji Asumsi Klasik.....	70
e. Analisis Regresi Linear dan MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>)	72
f. Uji Hipotesis	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	81
1. Gambaran Singkat Tentang OPD.....	81
2. Gambaran Karakteristik Responden	83
3. Jawaban Responden	85
4. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	87
a. Variabel Kompetensi SDM.....	89
b. Variabel Sistem Pengendalian Internal	91
c. Variabel Transparansi	93
d. Variabel <i>Value ForMoney</i>	95
e. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	96
5. Uji Validitas	98
6. Uji Reliabilitas	102
7. Uji Asumsi Klasik.....	103
a. Uji Normalitas	104

b. Uji Multikolinieritas.....	106
c. Uji Heteroskedastistas.....	107
8. Pengujian Hipotesis.....	110
a. Uji Regresi Berganda.....	110
b. Uji Koefisien Determinan.....	112
c. Uji F (Bersama).....	113
d. Uji t (Parsial).....	115
e. Uji Signifikansi Parsial (t) MRA.....	116
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	122
1. Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	122
2. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	125
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	126
4. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	128
5. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderasi dengan <i>Value For Money</i>	129
6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderasi dengan <i>Value For Money</i>	130
7. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderasi dengan <i>Value For Money</i>	133
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Survei Pendahuluan	12
Tabel II. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	50
Tabel III.1 Daftar Kantor OPD Kota Palembang.....	57
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel	59
Tabel III.3 Rincian Responden	61
Tabel IV.1 Daftar OPD Yang Bersedia	82
Tabel IV.2 Deskripsi Karakteristik Responden	83
Tabel IV. 3 Jumlah Responden	85
Tabel IV. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	88
Tabel IV. 5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kompetensi	90
Tabel IV. 6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sistem Pengendalian Internal	92
Tabel IV. 7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Transparansi.....	94
Tabel IV. 8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel <i>Value For Money</i>	95
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Akuntabilitas.....	97
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Kompetensi SDM	99
Tabel IV. 11 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal.....	99
Tabel IV. 12 Hasil Uji Validitas Transparansi.....	100
Tabel IV. 13 Hasil Uji Validitas <i>Value For Money</i>	101
Tabel IV. 14 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	102
Tabel IV. 15 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	103
Tabel IV. 16 Hasil Uji Normalitas	105

Tabel IV.17 Hasil Uji Multikolinearitas	106
Tabel IV. 18 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Rank Spearman)	108
Tabel IV. 19 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)	110
Tabel IV. 20 Hasil Uji Regresi Berganda	111
Tabel IV. 21 Hasil Uji Koefisien Determinan	113
Tabel IV. 22 Hasil Uji f (Bersama).....	114
Tabel IV. 23 Hasil Uji t (Parsial)	115
Tabel IV. 24 Hasil Uji MRA (Kompetensi SDM)	117
Tabel IV. 25 Hasil Uji MRA (Kompetensi SDM)	117
Tabel IV. 26 Hasil Uji MRA (Sistem Pengendalian Internal)	119
Tabel IV. 27 Hasil Uji MRA (Sistem Pengendalian Internal)	119
Tabel IV. 28 Hasil Uji MRA (Transparansi)	121
Tabel IV. 29 Hasil Uji MRA (Transparansi)	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	20
Gambar II. 2	Kerangka Pemikiran	54
Gambar IV. 1	Grafik Histogram	104
Gambar IV. 2	Hasil Uji Normalitas (Metode Grafik)	104
Gambar IV. 3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang semakin tumbuh pesat terhadap akuntansi sektor publik di Indonesia terkhusus pada kegiatan otonomi daerah. Otonomi daerah ialah suatu bentuk perwujudan dari desentralisasi pemerintah yang tujuannya untuk pemenuhan kepentingan daerah dengan menggunakan upaya yang dibuat lebih baik untuk mendekati tujuan dari pemerintah supaya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur bisa terwujud. Seiring dengan pengimplementasian otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada pada kendali pemerintah daerah. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem akuntansi daerah yang mampu untuk mengelola keuangan secara, akuntabel efisien, efektif, dan transparan.

Pemerintah dituntut agar dapat melakukan reformasi pada manajemen keuangan daerah dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut untuk peningkatan pelayanan birokrasi masyarakat, pemerataan masyarakat dan wilayah, terwujudnya keadilan nasional, meningkatkan peran masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, pengembangan demokrasi, mengembangkan peran dan fungsi DPRD juga memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

Adanya otonomi daerah, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas baik secara *vertikal* (kepada pemerintah atas) maupun secara *horizontal* (kepada

masyarakat daerah) atas pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wujud pertanggungjawaban pemerintah yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian, Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan salah satu tujuan dari pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah dan tindak lanjut Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian

internal di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut mendefinisikan SPI sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam peraturan tersebut diuraikan menjadi lima unsur, yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. (PP Nomor 60 Tahun 2008)

Faktor-faktor yang relevan mempengaruhi akuntabilitas : Falsafah dan konstitusi negara, tujuan dan sasaran pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas, tingkat keterbukaan (transparansi) pengelolaan, sistem manajemen birokrasi, misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait, dan jangkauan pengendalian dan kompleksitas program instansi. (Abdul dan Iqbal, 2019: 80-81)

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksud sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin

penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. (Arief, 2018: 13)

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. (Cris, 2019: 80)

Sistem pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan, dan keandalan data akuntansi usaha tersebut untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. (Anastasia dan Lilis, 2011: 82)

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu. (Abdul dan Iqbal, 2019: 30)

Value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. (Mahmudi, 2019: 83)

Value for money menjadi variabel moderasi untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dibutuhkan suatu sistem pengukuran kinerja tujuan *value for money* agar segala aktivitas pengelolaan keuangan dapat berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sehingga permasalahan pengelolaan keuangan yang dinilai negatif oleh publik misalnya inefisiensi, pemborosan dan korupsi dapat dicegah akan tetapi tidak

cukup dengan *value for money* saja perlu harus diperkuat dengan variabel independen seperti kompetensi sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengendalian internal yang kuat dan transparansi terhadap pihak internal dan eksternal, sehingga apabila konsep ini berjalan dengan demikian tujuan dari variabel moderasi untuk memperkuat hubungan variabel dependen dan independen akan terlaksana.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Sarifudin (2017); Atmadja dan Saputra (2018); Sabrina dan Ivan (2018); Nur, dkk (2018); Rosyidi (2018); Hafiz (2017), menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian diatas tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda, dkk (2019), yang menyatakan bahwa kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pancawati, dkk (2019); Amanda, dkk (2019); Sabrina dan Ivan (2018); Nur, dkk (2019); Rosyidi (2018) Putu, dkk (2014); Dewi (2016); Nurhasan (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahima dan Azima (2017); Ahmad (2017); Muslim, dkk (2017), Memberikan hasil yang berlawanan dari hasil penelitian diatas mereka menyatakan bahwa sistem pengendalian

internal tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Henny, dkk (2017); Rosyidi (2018); Dewi (2016), Terkait pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahima dan Azima (2017) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, menyatakan bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan oleh Julie (2018); Putu, dkk (2014); dan Nwosu (2015), Menyatakan bahwa *value for money* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian dari Pancawati, dkk (2019) yang berjudul Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang) bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, yang hasilnya menyatakan bahwa *value for money* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Upaya untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah diungkapkan dengan wajar dan berkualitas, setiap

tahunnya laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Opini BPK RI, baik dari sisi akademis dan aplikasi di lapangan, dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit (dalam hal ini adalah pemerintah daerah). Pemangku kepentingan akan memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi untuk mempercayai informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) apabila dinyatakan LKPD tersebut mendapat opini WTP. Hasil audit juga merupakan cerminan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun LKPD bersangkutan.

Pemberian opini BPK RI, khususnya opini WTP bermanfaat dalam menggambarkan kesesuaian pengelolaan keuangan dengan tata kelola terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu, kepercayaan publik termasuk investor kepada pemerintah daerah akan semakin meningkat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan terutama pada sektor prioritas daerah dan menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan anggaran serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat

Kota Palembang menjadi satu-satunya daerah di Sumatra Selatan yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali secara turut-berturut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Opini WTP ini diserahkan oleh BPK RI perwakilan Sumatera Selatan kepada Wali Kota Palembang Harnojoyo dan Ketua DPRD Kota Palembang Darmawan :

“Alhamdulillah, kita kembali menerima WTP, dan Palembang menjadi pionir di Sumsel, karena hanya Palembang yang menerima sampai 9 kali berturut – turut,” katanya. Harnojoyo mengatakan, WTP yang didapat merupakan hasil dari komitmennya sebagai Wali Kota dan kerja sama yang baik dari semua instansi. Plt Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Teguh Prasetya mengungkapkan, diberikannya WTP kepada Pemerintah Kota Palembang didasari beberapa faktor. “Faktor utamanya, karena komitmen Pemerintah Daerah, dalam hal ini Wali Kota Palembang dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), dan tidak ada temuan dalam pemeriksaan khususnya temuan material, walaupun ada, hanya sebatas administrasi,” (www.bisnis.com,2019)

Pemerintah Kota Palembang dalam Tahun 2010-2018 ini mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Opini dari BPK ini merupakan salah satu tolak ukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Palembang sudah baik. Namun disayangkan masih banyaknya fenomena praktik KKN dan pengelolaan keuangan yang bermasalah sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2014 seperti ; Pengelolaan piutang dan pencatatan aset tetap Pemerintah Kota Palembang belum sepenuhnya memadai, Kesalahan penganggaran dan pembebanan belanja pada tujuh OPD sebesar Rp225.327.793,00, Realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp39.150.000,00 pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak sesuai dengan peruntukan, Pengendalian dan pengelolaan

teknologi informasi aplikasi SIMDA belum memadai, Persiapan pemerintah kota Palembang menuju penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum sepenuhnya memadai, Pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran OPD belum tertib, sisa UP/TUP dan jasa giro sebesar Rp262.802.323,59 terlambat disetor ke kas daerah serta pajak penghasilan sebesar Rp23.996.103,00 terlambat disetor ke Kas Negara, Terdapat saldo pada rekening penampungan dana bergulir dinas perindustrian perdagangan dan koperasi (Perindagkop) yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp336.960.992,95, Perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan pada dua OPD sebesar Rp308.650.625,00, jangka waktu perjanjian sewa barang milik daerah Pemerintah Kota Palembang tidak sesuai dengan ketentuan, Jaminan Pelaksanaan atas kegiatan yang putus kontrak pada Dinas Perhubungan sebesar Rp17.320.950,00 tidak dicairkan, Kekurangan volume pekerjaan pada tujuh OPD sebesar Rp1.863.863.240,71. (LHP-BPK RI, 2014)

Fenomena yang terjadi pada tahun 2015 yaitu, Penyisihan piutang pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp3.619.233.769,48 dan penyisihan piutang lainnya sebesar Rp287.020.718,96 tidak disajikan sesuai perwali, Penatausahaan persediaan pada Dinkes dan Dinas Kebersihan belum sesuai ketentuan, Kesalahan penganggaran pada dua belas OPD Kota Palembang, Jasa Giro rekening milik Pemerintah Kota Palembang dipotong pajak penghasilan oleh BRI sebesar Rp4.953.249,00 dan BSM sebesar Rp41.597.401,94, Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium kegiatan tidak sesuai ketentuan, Realisasi belanja perjalanan dinas pada tujuh OPD tidak sesuai ketentuan sebesar

Rp155.184.941,00, Kelebihan pembayaran atas belanja barang jasa pada dua OPD sebesar Rp166.458.734,31, Realisasi belanja jasa konsultasi pada tiga OPD sebesar Rp832.769.016,51 tidak sesuai ketentuan, Dua belas paket belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan perumahan sebesar Rp3.263.518.000,00 belum diserahkan, Terdapat belanja bahan bakar minyak yang diragukan kebenarannya sebesar Rp58.452.166,00 pada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman, Belanja hibah dan pertanggungjawabannya tidak sesuai ketentuan, Nilai aset tetap KDP – Tanah sebesar Rp250.000.000,00 tidak diyakini kewajarannya dan proses pengadaannya senilai Rp1.395.600.000,00 berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang, Hasil pekerjaan pada kegiatan belanja modal tujuh OPD kurang volume pekerjaan sebesar Rp2.061.427.440,76 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp832.388.461,53, Jaminan pelaksanaan pekerjaan putus kontrak pada Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan sebesar Rp74.580.000,00 berpotensi tidak dapat dicairkan dan aset senilai Rp857.670.000,00 berpotensi rusak. (LHP-BPK RI, 2015)

Fenomena yang terjadi pada tahun 2016 seperti; Pengelolaan kas dana transfer pusat dan bantuan keuangan provinsi pada Pemerintah Kota Palembang tidak optimal, Kesalahan penganggaran dan kelemahan dalam pencatatan dan kapitalisasi aset atas transaksi pada belanja modal dan belanja barang dan jasa, Kelebihan pembayaran atas realisasi tunjangan profesi tahun anggaran 2016 sebesar Rp.845.284.900,00, pemberian insentif pajak penerangan jalan sebesar Rp.6.862.222.512,43 memboroskan keuangan

daerah, Terdapat kesalahan perhitungan artimatik dan kelebihan pembayaran atas pengadaan bahan makanan untuk panti sosial pada Dinas Sosial, Pertanggungjawaban atas kegiatan karya bhakti tahun 2016 pada badan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar Rp1.970.001.000,00 Tidak diyakini kewajarannya, Kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan belanja modal pada lima OPD sebesar Rp1.249.260.985,39 dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp71.435.356,26, Terdapat perubahan pekerjaan atas pembangunan gedung kantor lantai 2 RSUD Palembang BARI Sebesar Rp1.987.527.658,02 tanpa melalui negosiasi teknis dan harga. (LHP-BPK RI, 2016)

Fenomema yang terjadi pada tahun 2017 yaitu, Pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak sesuai peraturan daerah, Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai standar akuntansi pemerintah, penyaluran hibah barang kepada pihak ketiga/masyarakat tidak sesuai Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012, Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan kurang tertib;, Pemberian insentif pemungutan pajak daerah tahun 2017 sebesar Rp1.303.007.565,76 melebihi ketentuan maksimal gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 dan Keputusan Walikota Palembang Nomor 36/KPTS/BPPD/2017, Pemborosan keuangan daerah atas pembayaran honorarium pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembayaran rekening listrik Sekretariat Daerah Tahun 2017 sebesar Rp57.995.538,00 tidak sesuai ketentuan, Penggunaan BMD Operasional tidak sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana dan terdapat kelebihan

pembayaran atas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas; Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebesar Rp157.673.658,06 pada 17 OPD tidak sesuai ketentuan, Realisasi belanja kontribusi pada Bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp146.000.000,00 tidak sesuai ketentuan, Kelebihan pembayaran atas pekerjaan belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp527.746.268,78, penjualan kendaraan dinas belum sesuai ketentuan. (LHP-BPK RI, 2017)

Berdasarkan banyaknya temuan fenomena yang terjadi diatas tersebut menyebabkan timbulnya suatu keraguan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Palembang. Dengan landasan tersebut dilakukan survei pendahuluan yang diambil dari 4 sampel yang mewakili 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palembang yang dijadikan objek penelitian.

Tabel I. 1
Survei Pendahuluan

Kantor OPD	Fenomena yang Ditemukan
Dinas Sosial	Dalam perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih mengedepankan sistem pengendalian internal karena dengan sistem pengendalian internal yang baik dapat mengontrol, mengawasi dan mengarahkan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta menaati prosedur dan peraturan. Selain itu ditemukan juga berbagai permasalahan. pertama, belum optimalnya keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan baik dilingkungan eksternal maupun internal bahkan dalam lingkungan internal keuangan para pegawainya untuk menjaga kerahasiaan pengelolaan keuangan hal ini sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan keuangan, selain itu tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan anggaran padahal Dinas Sosial orientasi kegiatannya banyak keterlibatannya dengan kegiatan sosial harusnya peran masyarakat lebih diprioritaskan sehingga kebijakan yang dibuat tepat sasaran. Kedua, secara sistem pengelolaan keuangan daerah seluruh dinas/instansi pemerintah kota palembang sudah berbasis aplikasi sistem yang bernama SIMDA yang mana segala

	<p>proses input dan output keuangannya sudah <i>no money</i> sehingga penerimaan dan pengeluaran dilakukan via Bank SumselBabel akan tetapi masih ada suatu permasalahan yaitu ketika pengeluaran uang untuk pembelian keperluan dinas dalam menentukan pihak tempat pembelian belum ada ketentuan atau peraturan dan transparansi sehingga berpotensi penyalahgunaan kebijakan yaitu berupa <i>mark up</i> harga dan gratifikasi yang menyebabkan korupsi hal ini terjadi hampir disemua dinas/instansi.</p>
Dinas Koperasi dan UKM	<p>Lebih mengedepankan kompetensi SDM dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena dengan ditunjang kompetensi yang kuat akan bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi sehingga mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berdampak pada hasil yang efektif dan efisien. Namun disisi lain terdapat permasalahan, terkait sistem pengendalian internal, yaitu komunikasi dan informasi belum optimal sehingga kerjasama antara pegawai tidak berjalan dengan baik sehingga pegawai banyak berkerja secara individu yang berakibat tidak efektif dan efisien dalam berkerja, selain itu lingkungan pengendalian yang tidak baik dikarenakan kurangnya peran pengawasan dari atasan sehingga para pegawai lalai dengan tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan perkerjaan.</p>
Sekretaris Daerah	<p>Lebih mementingkan kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal dalam mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena menurutnya kompetensi terdiri dari pengetahuan , keahlian dan sikap sebagai penunjang yang signifikan dalam menjalankan tugas dan kewajiban selain itu SPI juga sangat berpengaruh dalam pencapaian akuntabilitas karena setiap aktivitas keuangan harus dilakukan pemantauan dan evaluasi sehingga hasilnya akan sesuai dengan harapan. Disini ditemukan juga beberapa permasalahan pertama, terkait <i>value for money</i> dalam pengelolaan keuangan sudah berbasis aplikasi sistem sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran secara <i>no money</i> atau via Bank SumselBabel akan tetapi hal ini menimbulkan dampak terhadap konsep <i>value for money</i> yaitu 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien) khususnya efektif dan efisien karena setiap pengeluaran keuangan dalam hal pembelanjaan pembayaran harus dilakukan via transfer rekening Bank SumselBabel termasuk pembelanjaan yang tidak material sehingga tidak efektif dan efisien dalam prosesnya. Kedua, terkait transparansi masih kurangnya keterbukaan dari pihak internal khususnya informasi keuangan sehingga akses masyarakat terhadap informasi keuangan cukup sulit.</p>
Inspektorat Kota	<p>Lebih fokus pada sistem pengendalian internal karena dengan SPI yang kuat menurutnya bisa mengarahkan dan menyiapkan serta memaksa SDM agar lebih baik sehingga akan terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat berfungsi sebagai pengawasan dan pembinaan internal pemerintah kota palembang. Inspektorat untuk sekarang lebih fokus pada pembinaan dari pada pengawasan, hal ini membuat tingkat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang efektif sehingga dapat memicu</p>

	terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan. Selain itu, adanya perubahan kebijakan dan wewenang yang dilakukan pemerintah berdampak pada kompetensi SDM yang harus beradaptasi dan mempelajari kembali aturan dan kebijakan baru sehingga berpengaruh terhadap kinerja.
--	--

Sumber : Penulis, 2019

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih menunjukkan hasil yang beragam, bahkan bertentangan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya sehingga menarik untuk di teliti lebih lanjut sebagai usaha mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Dengan demikian, maka peneliti memilih judul **“Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan *Value For Money* Sebagai Variabel Moderasi” (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan *value for money* sebagai variabel moderasi (Studi kasus pada organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Palembang) ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan *value for money* sebagai variabel moderasi (Studi kasus pada organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Palembang).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip kompetensi SDM, sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan *value for money* sebagai variabel moderasi khususnya dalam pemerintah Kota Palembang.

2. Bagi Pemerintah Kota

Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kota Palembang diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kompetensi SDM, sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan *value for money* sebagai variabel moderasi pemerintah Kota Palembang

3. Bagi Almamater

Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam mendorong dilakukannya penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2019) **Pengelolaan keuangan Daerah**. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Abubakar Ahmad A., Nifa A. Dibal, Peter Amade, & Pwagusadi Joyce (2017). *Effect Of Internal Control Activity On Financial Accountability And Transparency In Local Government Areas Of Borno State, Nigeria*. **Europuan Jurnal Bisnis dan Manajemen**. Vol.9 No.30. Diakses 30 November 2019, dari <https://pdfs.semanticscholar.org/aa6c/8f4149d1562a33076ebabb3127f0aa7fef3f.pdf>
- Amanda Mutiara Sweetenia, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia & Anissa Hakim Purwantini (2019) . Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah. **Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi**. Vol.17 No.1. Diakses 03 November 2019, dari https://scholar.google.co.id/scholar?start=60&q=jurnal+pengaruh+kompetensi+terhadap+akuntabilitas+keuangan&hl=id&as_sdt=0,5&as_vis=1#d=gs_qabs&u=%23p%3DTjIoJs1IOWIJ
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2011) **Sistem Informasi Akuntansi**. Yogyakarta : ANDI
- Arfan Ikhsan Lubis (2017) **Akuntansi Keperilakuan**. (Edisi 3). Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Atmadja dan Saputra (2018). Determinant Factors Influencing The Accountability Of Village Financial Management. **Academy of Strategic Management Journal**. Vol. 17 No.1 Diakses 05 November 2019 , dari <https://www.abacademies.org/articles/Determinant-factors-influencing-the-accountability1939-6104-17-1-158.pdf>
- Budi Setiyono (2014) **Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik**. Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic publishing Service)
- Christy Natalia Lewier. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Skripsi: Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dewi Yuli Angraini (2016, Februari). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. **JOM Fekon**, Vol.3 No.1 Diakses 27 Oktober 2019 dari

<https://media.neliti.com/media/publications/187026-ID-pengaruh-penerapan-sistem-keuangan-daerah.pdf>

Dinda Wulandari (2019) Palembang Catat Rekor Soal laporan Keuangan Daerah. **Bisnis.com**. Palembang. Diakses 06 Juli 2019 Melalui <https://m.bisnis.com/sumatra/read/20190528/533/928595/palembang-catat-rekor-soal-laporan-keuangan-daerah>.

Emron Edison, Yohny Anwar dan Imas Komariyah (2018) **Manajemen Sumber Daya manusia**. Bandung : Alfabeta

Eze Nwosu M (2015, Juni). Value For Money Audit: An Accountability Tool In The Nigeria Public Sector. **Internasional Jurnal Ekonomi, Perdagangan dan Manajemen**. Vol.3 Edisi 6 Diakses 30 Maret 2019, dari https://www.academia.edu/33975325/A_CRITICAL_ANALYSIS_OF_VALUE_FOR_MONEY_AUDIT_IN_PUBLIC_SECTOR

Grahita Chandrarin (2017) **Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif**. Jakarta Selatan : Salemba Empat

Hamdani (2016) **Good Corporate Governance**. Jakarta : Mitra Wacana Media

Henny Hendratmi, JMV Mulyadi, dan Tri Widiastuti (2017). Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah Pemerintah Kota Bekasi. **JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)**. Vol.3 No. 2 Diakses 06 November 2019, dari, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/767>

Ihyaul Ulum (2012) **Audit Sektor Publik**. Jakarta : PT Bumi Aksara

Julie Abdullah (2018) Pengaruh Penerapan Dimensi *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. **Jurnal Akuntansi**. Vol.1 No.1 Diakses 30 Maret 2019, dari, <https://www.researchgate.net/publication/328164624>

Mahmudi (2016) **Akuntansi Sektor Publik**. (Edisi Revisi). Yogyakarta : UII Press

Mahmudi (2019) **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. (Edisi ketiga). Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Mardiasmo (2018) **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta : ANDI

Mardiasmo (2018) **Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah**. (Edisi Terbaru) Yogyakarta : ANDI

- Mathius Tandiontong (2016) **Kualitas Audit dan Pengukurannya**. Bandung : Alfabeta
- Moeheriono (2012) **Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi**. (Edisi Revisi) Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Muh Arief Effendi (2016) **The Power of Good Corporate Governance**. (Edisi 2). Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Muhammad Busro (2018) **Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta : Prenadamedia Group
- Muhammad Hafiz (2017, Februari) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi. **JOM Fekon** Vol.4 No.1. Diakses 25 November 2019, dari <https://media.neliti.com/media/publications/134439-ID-pengaruh-kompetensi-aparatur-pemerintah.pdf>
- Muhammad Rosyidi (2018, Januari-Juni). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. **JOM FEB**, Vol.1 Edisi 1. Diakses 06 November 2019, dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/download/21747/21044>
- Muhamad Widiyatna (2017) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pemerintah Dengan Pendekatan *Value For Money* Pada SKPD Kulon Progo. Skripsi : Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Muslim A. Djalil, Nadirsyah, & Lisa Fatmi (2017) *Influence Of Implementation Of Government Accounting Standard And The Effectiveness Of Government's Internal Control System On The Quality Of Local Financial Report And Its Impact Toward The Accountability Of Regional Financial Management. A Research On Government Agencies Of Aceh Province, Indonesia*. **Research Journal of Finance and Accounting**. Vol.8, No.4. Diakses 31 Maret 2019. dari, https://www.researchgate.net/publication/315788772_Influence_of_Implementation_of_Government_Accounting_Standard_and_the_Effectiveness_of_Government's_Internal_Control_System_on_the_Quality_of_Local_Financial_Report_and_Its_Impact_Toward_the_Accountability
- Ni Made Sudiarianti, dkk (2015) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 18 : Medan : Universitas Sumatera Utara : Medan.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2018) **Metodologi Penelitian Bisnis**. Yogyakarta : ANDI

Nur Fitri Dewi, S. M. Ferdous Azam, & Siti Khalidah Mohd Yusoff (2019, Mei) *Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial Accountability*. Management Science Letters, Vol.9. Diakses 03 November 2019, dari <http://growingscience.com/beta/msl/3216-factors-influencing-the-information-quality-of-local-government-financial-statement-and-financial-accountability.html>

Nurhasan Hamidi (2013, Desember) Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam**. Vol.3 No.1 Diakses 31 Oktober 2019 dari, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/350>

Pancawati Hardiningsih, Rachmawati Meita, Ceacilia Srimindarti & Ida Kristiana (2019, Juni) Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. **Jurnal Akuntansi Syariah**. Vol.2 No.1 Diakses 03 November 2019 dari, http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/aktsar/article/view/4963/pdf_1

Pemerintah Kota Palembang (2019) Palembang.go.id. Diakses 23 Oktober 2019. dari, <https://www.palembang.go.id/new/>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Putu Riana Primayani, Nyoman Trisna Herawati, & Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) Pengaruh Pengendalian Internal, *Value For Money*, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. **e-Journal S1 Ak**. Vol.2 No. 1 Diakses 26 Oktober 2019. dari, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4353/3357>

Rahima Br. Purba dan Azima Medina Amrul (2017, Juli) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Vol. 8 No.1 Diakses 26 Oktober 2019 dari, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/130>

Riduwan (2012) **Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian**. Bandung : Alfabeta

Sabrina Nur Fhadillah dan Ivan Yudianto (2018) *The Influence Of Application Government Internal Control System, Asset Management And Human Resources Competencies To Financial Accountability Of Bandung Municipal Government*. **Journal of Accounting Auditing and Business**. Vol.1 No.1. Diakses 28 Maret 2019. dari, <https://www.neliti.com/id/publications/286961/the-influence-of-application-government-internal-control-system-asset-management>

Sarifudin Mada, Lintje Kalangi & Hendrik Gamaliel (2017) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Vol.8 No.2. Diakses 04 November 2019. dari, https://scholar.google.co.id/scholar?q=jurnal+pengaruh+kompetensi+terhadap+akuntabilitas+keuangan&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar#d=gs_qabs&u=%23p%3DNh8sjpaSlusJ

Sri Mulyani (2018) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, *Value For Money*, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018). Skripsi : Semarang : Universitas Stikubank Semarang

Syaiful Bahri (2018) **Metodelogi Penelitian Bisnis**. Yogyakarta : ANDI

V Wiratna Sujarweni (2015) **Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi**. Yogyakarta : Pustaka Baru

V Wiratna Sujarweni (2018) **Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi**. Yogyakarta : Pustaka Baru